

**STATUS ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



**DISUSUN OLEH :
NAMA : MUMU MUMIN M
NIM : 10421025045
SEM : XI**

**JURUSAN AHWAL ASSYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1431/2010**

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “ Status Anak Yang Lahir Dari Hasi Pernikahan Di Bawah Tangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai)”, latar belakang penelitian ini adalah ingin mengetahui status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak, sikap orang tua terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran, serta tinjauan Undang-Undang perkawinan terhadap status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan.

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yakni terhadap pasangan nikah massal antara tahun 2006-2007 yang sebelum melangsungkan nikah massal, mereka telah menikah di bawah tangan bahkan sudah mempunyai keturunan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di daerah ini banyak terdapat anak yang lahir dari pasangan nikah di bawah tangan yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui apakah mereka bermasalah dengan status mereka, sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran dan bagaimana pandangan Undang-Undang perkawinan terhadap status mereka.

Subjek penelitian ini adalah anak-anak yang lahir dari pasangan nikah di bawah tangan dan orang tuanya, serta objek penelitian ini adalah meneliti masalah-masalah yang dihadapi anak oleh anak sebagai akibat pernikahan orang tuanya tidak tercatat, serta sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rumbai dapat diketahui bahwa, sebagian besar anak yang lahir dari pernikahan orang tua mereka yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah adalah bermasalah dengan kebutuhan hidup mereka yang bersifat administrasi, karena mereka tidak memiliki bukti otentik untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan keturunan dengan pihak ayah, sehingga mereka terkendala dalam masalah wali nikah, tidak bisa menuntut ketika tidak mendapatkan bagian warisan, sampai tidak masuknya nama ayah mereka dalam kutipan akta kelahiran.

Sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran pada umumnya merasa kecewa, karena dalam kutipan itu mereka disamakan dengan anak di luar nikah, dalam hal hanya tercatatnya nama ibu tanpa menyertakan nama ayah.

Adapun tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap hal tersebut di atas, adalah tidak sah, karena banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh anak, sedangkan Islam menghendaki kemudahan dan menghindari kesulitan, sehingga segala sesuatu yang menyulitkan harus dihilangkan. Selain itu Mahkamah Agung pernah memutuskan tidak sahnya nikah di bawah tangan, maka apabila nikahnya tidak sah menurut Undang-Undang maka anak yang dilahirkannya pun adalah tidak sah.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN RUMBAI	
A. Geografi.....	14
B. Demografi.....	18
C. Penduduk.....	19
D. Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama.....	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Kedudukan Anak Menurut Pandangan Islam.....	30
B. Pengertian Anak Yang Sah.....	34
C. Anak Di Luar Nikah.....	41

	D. Penetapan Asal Usul Anak	
	Dalam Undang-Undang.....	44
BAB IV	STATUS ANAK YANG LAHIR SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI)	
	A. Akibat Pernikahan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Kehidupan Anak.....	46
	B. Sikap Orang Tua Dan Anak Terhadap Prosedur Dan Hasil Kutipan Akta Kelahiran.....	56
	C. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Status Anak Yang Lahir Sebelum Pencatatan Perkawinan.....	61
	D. Analisis.....	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dipandang mulia menurut hukum Islam. Hubungan perkawinan dimaksud sebagai ikatan yang dapat menghimpun dan mengumpulkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan yang sah. Melalui perkawinan, pasangan suami istri dapat mengatur hidup dan menjalin ikatan kasih sayang.

Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Th. 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Nikah atau perkawinan merupakan *Sunnatullah* pada hamba-hambaNya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Taala berfirman :

¹Departemen Agama RI, *Undang-undang no 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Direktur Pembinaan Peradilan Agama) th. 2002, h. 117

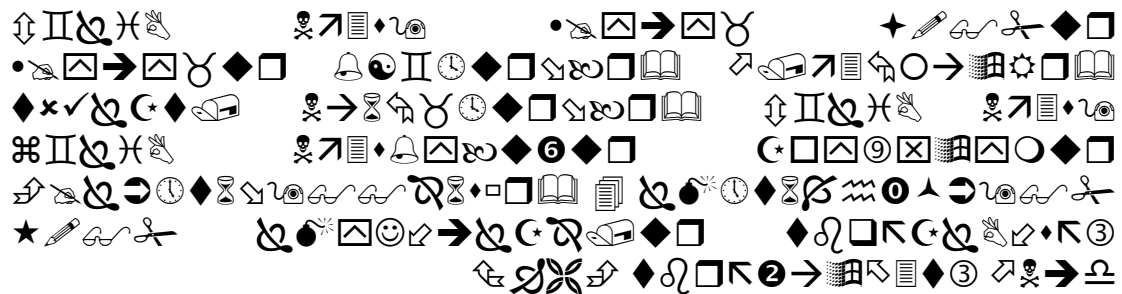
²Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991, h. 20



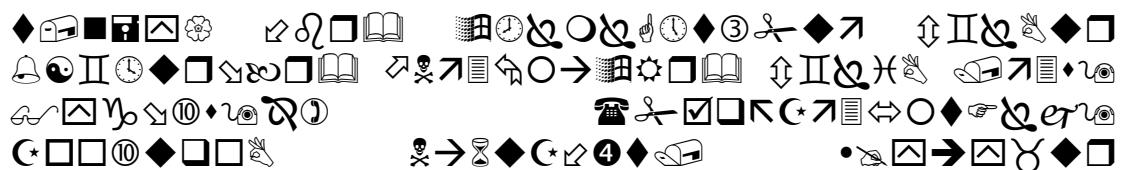
Artinya :“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.⁴

Anjuran menikah tertera dalam firman Allah SWT :



Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"⁵



³Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra) th.1989, H. 862

⁴Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih wanita* (Semarang : CV.Asy-Syifa)th.1986 H.358

⁵Depag RI, *Op-cit*, H. 412



Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’⁶

Demikian juga halnya dorongan untuk melakukan perkawinan yang terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Antara lain ialah anjuran beliau kepada kaum muda untuk menikah, sabda beliau :

يا معشر الشباب، استطاع منكم الباءة فليتزوج، اغض للبد

Artinya :“ Hai kaum pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu kawin, maka beristilah. Karena dengan beristri itu akan mampu menjaga mata dan memelihara kemaluan.”⁷

Bagi orang yang telah mampu menikah, sangat dianjurkan untuk beristri. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al Qurtubi mengatakan : “bagi orang yang mampu menikah, sedang dia khawatir dirinya terjerumus kedalam dosa sehingga agamanya terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu akan bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam keadaan seperti ini.”⁸

⁶ Ibid, H. 644

⁷Musthofa Muhammad Imarah, *Jawahir Albukhari*, (Semarang : Toha Putra,1940) cet. Ke 6, h. 421-422

⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Op-cit*, h. 360

Sayyid Bakri dalam kitab I'anatut Thalibin menetapkan ada 5 rukun nikah, yaitu calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dan dua orang saksi dan sighthat ijab qabul.⁹

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dikuatkan lagi dengan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat “. Dilanjutkan dalam pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah . Ayat (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan ini bisa berdampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, mulai dari tidak diperkenankan menjadi wali Nikah oleh PPN bagi ayah dari anak tersebut, sampai kegagalan di dalam penulisan akta kelahiran dengan hanya menuliskan ibu dari anak tersebut, padahal biasanya dituliskan secara lengkap nama ayah dan ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Perkawinan “ bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹²

Bagaimana halnya dengan nikah massal atau kembali melakukan pernikahan baru dihadapan PPN yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lama menikah bahkan telah mempunyai anak, namun tidak mempunyai akta nikah . Dan setelah mengikuti nikah massal atau melakukan pernikahan baru dihadapan PPN,

⁹Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Dina utama : Semarang, 1993), h. 22

¹⁰Departemen Agama RI, *Op-cit*, h. 117

¹¹Kompilasi Hukum Islam, *Op-cit*, h. 21

¹²Departemen Agama RI, *Op-cit* H. 125

barulah mereka mempunyai Akta Nikah, namun tanggal pernikahan yang dicatat adalah tanggal pernikahan ketika mengikuti nikah massal atau pernikahan baru tersebut bukan tanggal pernikahan yang pertama, dan penghulu tidak berani mencatat dengan tanggal pernikahan pertama dikarenakan hukum tidak berlaku surut.¹³

Diantara kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yang terjadi di Kecamatan Rumbai adalah kasus Bejo, yang telah menikah dibawah tangan selama 20 tahun dengan istrinya Minah, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Tetapi baru mempunyai akta Nikah, ketika dirinya mengikuti Nikah Massal tahun 2007 di Kecamatan Rumbai. Sebelumnya dia melangsungkan pernikahan dengan istrinya hanya di depan ustad dan rekan kerjanya saja sebagai saksi, yaitu ketika dia bekerja disebuah proyek penebangan kayu yang jauh dari pemukiman penduduk. Masalah yang timbul belakangan adalah, ketika anak perempuan pertamanya akan melangsungkan pernikahan, Bejo tidak diperkenankan menjadi wali nikahnya. Dikarenakan ada keraguan dari penghulu, berhubung tidak adanya akta nikah, yang menguatkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anaknya, dan ketika penghulu bertanya kepada tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, tidak ada yang bersedia bersaksi bahwa calon mempelai wanita tersebut adalah anaknya Bejo. Akhirnya terpaksa memakai wali hakim untuk menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut.¹⁴

Kemudian kasus Miswar, yang juga sama-sama mengikuti nikah massal pada tahun 2007 lalu, dimana Miswar baru mempunyai Akta Nikah pada tahun itu yakni tertanggal 12 Februari 2007, yaitu hari pelaksanaan nikah massal di Kecamatan Rumbai. Padahal sebelumnya dia telah menikah di Aceh secara sah, namun dia belum sempat menerima akta nikahnya dikarenakan pada waktu itu terjadi kerusuhan GAM

¹³ Mawardi, 46 tahun, penghulu kecamatan Rumbai, *wawancara*, tanggal 25 juli 2008

¹⁴ Irwan, Ketua RW 05 Palas, *wawancara*, tanggal 14 agustus 2008

di Aceh, kemudian dia dan istrinya merantau ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali lagi ke Aceh. Dan sampai saat dia mengikuti nikah massal dia telah dianugrahi seorang anak. Permasalahan yang dialami anak Miswar adalah ketika akan membuat akta kelahiran untuk anaknya ternyata tidak semudah anak yang lainnya, karena dalam proses pembuatan akta harus melampirkan foto kopi akta nikah sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran. Berhubung anak tersebut terlahir sebelum akta nikah yang dimilikinya ada, maka dibuatlah surat pernyataan bahwa Miswar telah menikah dengan istrinya yang ditanda tangani oleh Lurah dan Pamong, hasilnya anak tersebut bisa mempunyai akta kelahiran dari kantor catatan sipil, hanya saja disebutkan dalam akta kelahiran itu anak dari seorang perempuan yang bernama Lindawati (istri Miswar) tanpa menyebutkan nama ayahnya (Miswar).¹⁵

Selain itu ada juga kasus Fauzi yang tidak mendapat bagian warisan dari ayah dan ibunya yang tidak mempunyai akta nikah, dikarenakan habis dijual oleh dua orang kakaknya, dan ketika dia bermaksud menuntutnya lewat pengadilan, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat menyarankan untuk memikirkannya kembali, karena Fauzi tidak mempunyai bukti bahwa dia adalah pewaris dari orang tuanya itu, dan sampai saat ini dia belum juga berani membawa kasus ini sampai ke pengadilan.¹⁶

Kasus-kasus semacam ini banyak terjadi di Kecamatan Rumbai, dan pada gilirannya menjadi masalah yang serius dan menjadi keluhan bagi orang-orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu perlu penetapan hukumnya secara jelas dan sistimatis dari pakar-pakar hukum. Dan apakah memang begitu didalam Syariat Islam, bahwa anak yang lahir sebelum orang tuanya mempunyai Akta Nikah padahal kalau dilihat dari syarat dan rukun nikah telah sah, tetap dipandang tidak mempunyai kekuatan

¹⁵ Irwan, *Ibid*

¹⁶ Fauzi, masyarakat, *Wawancara*, tanggal 11 november 2008

hukum sebagai status ayah dan anak. Dan saya rasa bahwa kasus semacam ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut diatas didalam suatu kajian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ” **STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI)** “.

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan yang ada di Kecamatan Rumbai antara tahun 2006-2007, yakni tentang akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak, sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran, serta status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan ditinjau menurut undang-undang perkawinan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak ?
2. Bagaimana sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran ?
3. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan ditinjau menurut Undang-undang perkawinan ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bahwa setiap penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan serta kegunaannya. Dalam penelitian ini penulis paparkan kedua aspek tersebut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat dari pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak
- b. Untuk mengetahui sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran.
- c. Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan ditinjau menurut Undang-undang perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat dan menjadi pedoman setidaknya menjadi bahan perbandingan dalam permasalahan pasangan suami istri yang tidak mempunyai Akta Nikah serta status anaknya.
- c. Untuk menambah wawasan pemikiran penulis dalam kasus anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah

dan semoga dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat kecamatan Rumbai serta masyarakat Islam pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian adalah Kecamatan Rumbai. Di pilihnya Kecamatan Rumbai sebagai lokasi penelitian karena di dalam masyarakat Kecamatan Rumbai ini banyak kasus pasangan suami istri yang belum mempunyai Akta Nikah dan setelah mengikuti nikah massal atau melakukan pernikahan baru, barulah mereka mempunyai Akta Nikah, itupun tidak bisa diberi tanggal pada pernikahan pertama mereka, melainkan bertanggalkan hari pelaksanaan nikah massal atau pernikahan baru tersebut. Sedangkan kebanyakan dari mereka telah memiliki anak, sebelum mengikuti nikah massal atau pernikahan baru tersebut. Dan mereka sangat risau akan kejelasan status anak mereka.

2. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi adalah seluruh anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan diseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sedangkan yang menjadi sampelnya adalah anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Rumbai antara tahun 2006-2007 yaitu sebanyak 12 kasus. Cara pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari hasil wawancara kepada anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan dan kedua orang tua mereka serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Disamping penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) juga penelitian ini bersifat study pustaka (library research). Maka pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Study Pustaka, yaitu dengan cara meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Study lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara secara terarah dan mendalam yang sasarannya adalah terhadap masyarakat yang terkait dalam masalah penelitian.
- c. Observasi, yaitu dengan cara melihat secara dekat terhadap masalah yang diteliti.

5. Metode Pembahasan

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisa, sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara khusus.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini dapat dipahami, maka berikut akan penulis paparkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima BAB. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum kecamatan Rumbai yang terdiri dari Geografi dan Demografi, Penduduk, Sosial Budaya, pendidikan dan kehidupan beragama.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang anak, yang terdiri dari Kedudukan Anak Menurut Pandangan Islam, Pengertian Anak yang Sah, Anak Luar Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak.

Bab keempat adalah pembahasan pokok tentang status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan yang terdiri dari akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak, sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran, status hukum anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Analisis Penulis.

Bab kelima adalah Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN RUMBAI

A. Geografi

Kecamatan Rumbai adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang merupakan kecamatan pemekaran sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 juni 2003 tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.¹

Adapun Kecamatan Rumbai merupakan salah satu dari delapan Kecamatan tertua di Kota Pekanbaru. Namun dari segi pengelolaan wilayah Kecamatan Rumbai adalah Kecamatan baru hasil Pemekaran dengan Kecamatan Rumbai Pesisir. Hal ini dikarenakan fasilitas-fasilitas Pemerintahan mulai dari Kantor Kecamatan, Polsek, Koramil, KUA, dan Dinas Pendidikan Cabang, terletak di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. Untuk menjalankan roda Pamarintahan di Kecamatan Rumbai, kini telah dibangun Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama dan Kapolsek. Sedangkan fasilitas pemerintahan lainnya yakni KORAMIL dan Dinas Pendidikan Cabang masih menginduk dengan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Luas keseluruhan kecamatan Rumbai 128,85 km², dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Kabupaten Siak
- Barat berbatas dengan : Kabupaten Kampar
- Selatan berbatas dengan : Sungai Siak (Kecamatan Payung Sekaki)
- Timur berbatas dengan : Kecamatan Rumbai Pesisir²

¹Potensi Wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Tahun 2009

²*Ibid*

Jarak pusat pemerintahan dengan Kelurahan terjauh yaitu Kelurahan Muara Fajar berjarak kurang lebih sekitar 19 Km. Sedangkan jarak pusat Kecamatan Rumbai dengan Ibukota Kota Pekanbaru kurang lebih sekitar 15 Km dan dengan Ibukota Provinsi Riau kurang lebih sekitar 15 Km.

Bentuk wilayah Kecamatan Rumbai pada umumnya datar berombak, dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sedangkan sebagian yang lain terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, serta kerosif untuk besi yang umumnya terdapat di pinggiran Sungai Siak. Dengan keadaan tanah semacam ini hanya bisa ditumbuhi oleh jenis tanaman yang tahan dengan keasaman tinggi seperti paku-pakuan dan sejenisnya. Untuk tumbuh-tumbuhan yang tidak toleran dengan asam yang tinggi harus diberi obat penawar keasaman.

Pada umumnya Kecamatan Rumbai ini beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,0^{\circ}\text{C}$ – $36,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $20,0^{\circ}\text{C}$ dan $22,4^{\circ}\text{C}$. curah hujan antara 96,6 – 560,8 mm per tahun. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Pebruari. Sementara musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus. Kelembaban maksimum antara 96 % sampai 100%, sedangkan kelembaban minimum antara 44% - 50%.

Letak kantor Kecamatan Rumbai berlokasi di jl. T. Kasim Perkasa Kelurahan Rumbai Bukit dengan jumlah pegawai sebanyak 50 orang dan instansi Vertikal yaitu : Polsek, KUA, Puskesmas, Statistik serta Koramil dan Cabang Dinas DISPORA yang masih bergabung dengan kecamatan Rumbai Pesisir.

Secara administrative wilayah Kecamatan Rumbai terdiri dari 5 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Muara Fajar

2. Kelurahan Palas
3. Kelurahan Rumbai Bukit
4. Kelurahan Umban Sari
5. Kelurahan Sri Meranti³

Dengan jumlah RT sebanyak 187 dan RW 45.

Masing-masing kelurahan mempunyai luas wilayah yang tidak sama, karena pembagian wilayah didasarkan kepada jumlah penduduk masing-masing kelurahan bukan kepada luasnya daerah.

Dengan luas masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Perkelurahan

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH	
		(KM2	RT	KK
1.	RUMBAI BUKIT	54	22	1225
2.	PALAS	50	19	1582
3.	MUARA FAJAR	25	35	2688
4.	SRI MERANTI	8,6	71	4098
5.	UMBAN SARI	7,9	40	4076
JUMLAH		145,5	187	13669

Sumber data diperoleh dari data monografi Kecamatan Rumbai 2009.

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa daerah terluas adalah Kelurahan Rumbai Bukit dengan luas Daerah 54 KM2, disusul kelurahan Palas 50 KM2, Kelurahan Muara Fajar 25 KM2, Kelurahan Sri meranti Seluas 8,6 KM2, dan terakhir Kelurahan Umban Sari 7,9 KM2.

³*Ibid*

Namun Luas daerah berbanding terbalik dengan keadaan Rukun Tetangga (RT) dan kepala keluarga (KK) yang mendiami kelima Kelurahan di Kecamatan Rumbai. Justru Kelurahan Sri Meranti yang merupakan daerah terkecil kedua menurut luas wilayah menempati urutan terbanyak dari segi pembagian wilayah menurut RT dan Kepala Keluarga dengan 71 RT dan 4098 KK, disusul Kelurahan Umban Sari dengan 40 RT dan 4076 KK, Muara Fajar 35 RT dan 2688 KK, Kelurahan Palas 19 RT dan 1582 KK dan terakhir Kelurahan Rumbai Bukit dengan 22 RT dan 1225 KK.

B. Demografi

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan pinggiran di kota Pekanbaru, salah satu faktornya adalah karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kota dan terbelah oleh aliran sungai Siak. Untuk menyeberang ke Kecamatan Rumbai, sekarang telah ada dua jembatan yang bisa dilalui, yakni jembatan siak I dan jembatan Siak II. Bahkan kini sedang dibangun jembatan Siak III yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir, namun masih belum selesai dikerjakan karena terkendala dengan masalah enggan nya penduduk pesisir sungai yang berada di bawah jembatan Siak III untuk pindah, dikarenakan ganti rugi dari pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan harga tanah yang sesungguhnya di pasaran.

Begitu juga dengan jumlah penduduk Kecamatan Rumbai tidak sebanyak jumlah kecamatan-kecamatan lain di kota Pekanbaru, salah satu faktornya adalah banyaknya lahan kosong milik para pejabat Negara dan orang-orang kaya yang tidak mau membangun ataupun menjual tanah tersebut..

C. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai berdasarkan sensus penduduk sampai bulan januari 2009 adalah 56.836 jiwa, terdiri dari : penduduk laki-laki 29.272 jiwa dan perempuan 27.186. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 13.791.

Apabila dibandingkan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk adalah 444 jiwa setiap km².

Untuk lebih jelasnya distribusi penduduk laki-laki dan perempuan pada masing-masing Kelurahan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkelurahan dalam Kecamatan Rumbai

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS				JUMLAH (JIWA)	KET
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
1	SRI MERANTI	11162	19,8	9736	17,3	20898	37,1%
2	UMBAN SARI	6754	11,9	6685	11,8	13439	23,7%
3	MUARA FAJAR	4521	8,0	4629	8,2	9150	16,2%
4	PALAS	3976	7,0	3414	6,0	7390	13,0%
5	RUMBAI BUKIT	2859	5,1	2722	4,9	5581	10,0%
JUMLAH		29272	51,8	27186	49,2	56836	100%

Sumber rekapitulasi jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Maret 2009.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk laki-laki pada masing-masing Kelurahan lebih mendominasi daripada penduduk perempuan, kelebihan jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan hampir mencapai 2 %. Besarnya kuantitas penduduk laki-laki dibanding perempuan disebabkan karena salah satu faktornya adalah penambahan penduduk berasal dari arus urbanisasi dari daerah-daerah yang bertetangga dengan kota Pekanbaru seperti dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Mereka datang ke Pekanbaru untuk mencari penghidupan seiring dengan perkembangan pesat dalam pembangunan yang sedang dialami oleh kota Pekanbaru dalam rangka mensukseskan visi Riau 2020 menjadikan Pekanbaru sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Di Kecamatan Rumbai, pertumbuhan penduduk tergolong pesat, di mana mencapai rata-rata 5,5% pertahun. Sementara tingkat ketersediaan peluang pekerjaan relatif rendah, sehingga tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Keadaan ini mendorong pemerintah Kota untuk melakukan pembatasan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) dan menghambat jumlah penduduk melalui urbanisasi dari desa ke kota Pekanbaru atau migran. Dengan cara ini dimungkinkan jumlah penduduk dapat ditekan walaupun relative kecil artinya jumlah penduduk sesuai dengan daya tampung kota yakni luas wilayah dengan jumlah penduduk yang bermukim di dalam Kota Pekanbaru. Kalau daya tampung melebihi kapasitas kemampuan lingkungan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat merusak keadaan lingkungan dan masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut, antara lain masalah kesehatan, air bersih dan masalah pemukiman penduduk dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya, adalah masalah perumahan tempat tinggal penduduk masih jauh dari mencukupi, terutama perumahan bagi masyarakat miskin. Mereka ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Pekanbaru, bagaimana mendapatkan rumah tempat tinggal yang layak dengan cara mencicil dengan dana kecil. Di dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin jangan hanya dipandang dari sudut keuntungan saja, akan tetapi tonjolkanlah sosial religius yang punya keinginan untuk membantu kehidupan masyarakat kurang mampu bahkan tidak mampu.

D. Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama

a. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Rumbai bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kecamatan Rumbai penduduknya multi etnis. Kecamatan ini dihuni oleh

etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta sekelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian, etnis Melayu merupakan jumlah terbesar. Hal ini karena etnis Melayu merupakan etnis asli masyarakat Riau, sedangkan etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kecamatan Rumbai. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakikatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya didukung oleh norma – norma dan adat. Meski kedua kekuatan tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.⁴

Stratifikasi masyarakat Kecamatan Rumbai pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya stratifikasi ditentukan oleh suatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenis penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kecamatan Rumbai sekurang – kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat dalam pelapisan masyarakat, melihat Kecamatan Rumbai sebagai Kota Minyak, dan perdagangan yang sedang menggeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia industrialisasi. Selain itu sektor pertanian, perkebunan,

⁴Pekanbaru Dalam Angka, Tahun 2006

dan perikanan merupakan sektor andalan di kecamatan Rumbai. Dengan produk berupa jagung, kelapa sawit, ketela, buah-buahan, dan sayur mayur.

Perkembangan pertanian di Kecamatan Rumbai memang tidak terlepas dari luas wilayah dan kesuburan tanah. Banyaknya lahan kosong serta permintaan pasar yang tinggi terhadap hasil pertanian, membuat sebagian masyarakat Rumbai yang tinggal dipinggiran kota tertarik untuk berwira usaha di bidang sektor pertanian. Di samping itu kesuburan tanah dan iklim yang relatif stabil, sangat mendukung untuk pengembangan sektor pertanian. Maka tidak heran apabila bermunculan usaha-usaha pertanian baik secara individu ataupun bersifat kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Rumbai Tahun 2008			
No	Jenis Kelompok	Jumlah	Ket
1.	Kelompok tani	48	83%
2.	Kelompok Petani Kecil (KPK)	6	10%
3.	Gabungan Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	1	1,8%
4.	Gabungan Kelompok Tani Tingkat Kelurahan	2	3,4%
5.	Kelompok Petani Nelayan Andalan (KTNA)	1	1,8%
Jumlah		58	100%

Sumber data potensi Kecamatan Rumbai Tahun 2008

Rumbai sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi agrowisata karena memiliki lahan yang luas. Selain itu daerah ini memiliki sungai Siak yang akan menjadi pendukung pengembangan agrowisata tersebut.

Kecamatan Rumbai yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, Perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang

diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya.⁵

Permasalahan Aktual yang kini menjadi kendala di Kecamatan Rumbai adalah:

1. Perlunya pendataan ulang/update data keluarga pra sejahtera/miskin dengan melibatkan instansi terkait, menyangkut bantuan RASKIN maupun BLT (bantuan langsung Tunai)
2. Perlunya pembersihan berkala parit anak sungai Umban Sari guna menghindari banjir.
3. Penertiban pedagang di lokasi bahu jalan Yos Sudarso (simpang bingung)
4. Penataan kawasan rawan banjir di Kelurahan Sri Meranti, Palas, Umban Sari melalui pembuatan drainase, pompa air maupun relokasi perumahan.
5. Penataan industri Rotan sepanjang jalan Yos Sudarso di Kelurahan Sri Meranti.
6. Pemasangan / penambahan Travo/jaringan listrik dan telepon terkait pemenuhan layanan publik.⁶

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Karena itu keberhasilan sebuah pembangunan banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu pemerintah Kecamatan telah mencanangkan Kecamatan Rumbai sebagai pusat pendidikan. Hal ini dipacu oleh kesadaran akan pentingnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Untuk itu pemerintah Kecamatan

⁵Pekanbaru Dalam Angka, *Loc-Cit*

⁶Potensi Kecamatan Rumbai, *Op.cit*, h.5

telah memulainya dengan meningkatnya sistem, sarana dan fasilitas sarana pendidikan.

Tabel 2.4

Data Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Rumbai

Jenis Sekolah	Tingkatan						Ket
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT	
Negeri	-	16	5	2	1	-	
Swasta	6	-	-	-	-	2	
jumlah	6	16	5	2	1	2	

Sumber data potensi Kecamatan Rumbai Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat kita lihat fasilitas-fasilitas pendidikan di Kecamatan Rumbai telah cukup memadai walaupun tidak berimbang. Sekolah Dasar telah cukup banyak yakni berjumlah 16 sekolah, namun tidak diimbangi oleh jumlah sekolah lanjutannya yaitu SMP yang hanya berjumlah 5 buah, SMA 2 buah dan SMK 1 buah.

Perguruan Tinggi yang ada di Kecamatan Rumbai berjumlah 2 buah yaitu, Universitas Lancang Kuning dan Politeknik Kaltek Riau, yang mana keduanya merupakan Perguruan Tinggi kebanggaan masyarakat Rumbai dan juga Kebanggaan masyarakat Riau.

Selain sekolah negeri dan swasta, untuk melengkapi kebutuhan rohani serta sesuai dengan kebudayaan melayu yang terkenal religius, di Kecamatan Rumbai telah dibangun sekolah-sekolah agama, yang cukup banyak walaupun masih kalah banyak dibanding sekolah-sekolah umum yang telah ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Data sekolah Agama Negeri dan Swasta di Kecamatan Rumbai

Jenis Sekolah	Tingkatan				Ket
	Diniyah/Awaliah	Ibtidaiyah	Tsanawiah	Aliyah	
Negeri		-	3	1	
Swasta	15	1	-	-	
Jumlah	15	1	3	1	

Sumber data potensi Kecamatan Rumbai Tahun 2009

Madrasah Diniyyah Awwaliyah merupakan sekolah terbanyak, yang mana kesemuanya didirikan atas dasar swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan pendidikan Agama yang diajarkan di Sekolah Dasar, agar anak-anak mengerti tuntunan agama serta berbudi pekerti yang baik. Disamping itu ada juga madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 buah, setara dengan SD tetapi berbasiskan agama. Untuk kelanjutannya Mts sebanyak 3 buah dan MAN sebanyak 1 buah.

c. Agama

Masyarakat Kecamatan Rumbai, adalah masyarakat yang mencintai damai yang selalu rukun serta agamis. Kerukunan tersebut tercipta selain karena eksistensi norma adat, terutama merupakan tuntunan agama yang mengikat dan mengarahkan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosisal, agama selalu menjadi acuan baik dalam bertindak maupun bertingkah laku. Pola hidup umat Islam mengacu pada ajaran – ajaran pokok dalam Islam. Demikian pula penganut Kristen Khatolik atau Protestan, Hindu, Budha yang semuanya mempunyai pola kehidupan yang mengacu dan diwarnai oleh agama yang dianutnya masing – masing. Mayoritas penduduk Kecamatan Rumbai yang sebagian besar merupakan etnis melayu yang menganut Islam. Orang melayu tergolong orang orang yang taat menjalankan agama. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai aktivitas keagamaan yang dilaksanakan baik secara *individual* maupun *kolektif* (berjamaah). Selain berbentuk pengalaman ajaran – ajaran agama yang *diwajibkan*, seperti sholat, puasa, zakat, maupun haji bagi mereka yang sanggup, terdapat pula pengalaman ibadah yang disebut *Nafilah* (sunat) dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti *majlis ta'lim* dan lain sebagainya.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	NAMA AGAMA	JUMLAH JIWA	KET
1	ISLAM	48.921	86%
2	KHATOLIK	3.370	6%
3	PROTESTAN	4.122	7,25%
4	HINDU	2	0,16%
5	BUDHA	34	0,59%
6	KONGHUCU	0	0%
JUMLAH		56.836	100%

Suber data buku laporan sensus kecamatan Rumbai 2009

Agama Islam merupakan mayoritas di Kecamatan Rumbai dengan persentase mencapai 86% dan cukup mewarnai corak kehidupan masyarakat Rumbai, disusul dengan Kristen protestan mencapai 7,25 %, Khatolik mencapai 6% dan disusul Budha 0,59% dan Hindu 0,16%, sedangkan yang beragama Konghucu tidak ada atau 0%.

Untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, seperti Masjid, Musholla dan Surau bagi penganut agama Islam. Gereja, bagi mereka yang beragama Kristen. Rumah ibadah tersebut banyak yang tidak tercatat di Departemen Agama oleh pengurus rumah ibadah, bahkan sengaja tidak di daftarkan kepada Departemen Agama oleh pengurus karena kalaupun

tetap didaftarkan tidak akan mendapatkan izin dari Departemen Agama karena belum memenuhi syarat mendirikan tempat ibadah yakni setiap 90 KK hanya berhak mendirikan satu tempat ibadah. Namun pada kenyataannya rumah ibadah itu ada berdiri di tengah – tengah masyarakat walaupun tanpa memiliki izin dengan alasan jarak yang jauh dari pemukiman penduduk ketempat ibadah yang telah memiliki izin dari Departemen agama. Untuk itu pemerintah kota Cq Departemen Agama Kota Pekanbaru, harus memantau lebih jauh tentang keberadaan sebuah rumah ibadah. Dalam memelihara akhlak atau moral masyarakat beragama. Namun satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terutama pemerintah kota yang dalam hal ini adalah Departemen Agama Kota Pekanbaru harus mampu menselaraskan jumlah rumah ibadah dengan jamaahnya.⁷

Adapun data sarana ibadah di Kecamatan Rumbai dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7

Data sarana ibadah di Kecamatan Rumbai

NO	Nama tempat ibadah	Jumlah	ket
1	Mesjid	23 buah	
2	Mushalla	29 buah	
3	Gereja Katolik	1 buah	
4	Gereja Protestan	9 buah	
5	Pura	–	
6	Vihara	2 buah	

Sumber data potensi Kecamatan Rumbai 2009

⁷Pekanbaru dalam Angka, *Loc.cit*

Mesjid dan Mushalla merupakan tempat ibadah terbanyak di Kecamatan Rumbai Masjid 23 buah dan Mushalla 29 buah hal ini sesuai dengan jumlah penduduk Muslim di Kecamatan Rumbai yang merupakan mayoritas. Sedangkan Gereja Katolik 1 buah dan Gereja Protestan adalah 9 buah, kebanyakan dari mereka tinggal di Kelurahan Palas dan disediakan tempat khusus oleh pemerintah untuk komunitas Kristen yang biasa disebut oleh masyarakat Rumbai daerah Pastoran.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Kedudukan Anak Menurut Pandangan Islam

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh, atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.¹

Menurut imam Al-Ghozali, ada lima hal yang merupakan masalah *dlaruriyat* dalam hidup manusia, yaitu :

- Agama (ad-diyn)
- Jiwa (an-nafs)
- Akal (al-aql)
- Harta (al-maal)
- Keturunan (an-nasl)

Dalam istilah kepustakaan Islam, lima hal tersebut dikenal dengan *al-dlaruriyat Al khams*. Dan Al-Ghozali mengatakan bahwa segala hal dapat menjamin eksistensi dan pelestarian lima macam *dlaruriyat* tersebut dapat disebut sebagai *masalahah* (konstruktif) dan sebaliknya segala hal yng mengganggu eksistensi dan pelestariannya, dapat disebut sebagai *mafsadat* (destruktif).²

Apabila An-nasl atau keturunan termasuk masalah *dlaruriyat*, maka dengan sendirinya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak menjadi sangat penting

¹WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka) H.38

²M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah SDM*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005) H. 5

dan berifat dlaruri juga. Dan Islam memandang anak dalam tiga dimensi (ukuran) yakni :

Pertama : Dimensi sosial, tujuan pernikahan dalam Islam antara lain untuk melestarikan keturunan. Anak merupakan bagian esensial dalam kesejahteraan keluarga disamping istri , suami, harta dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini ajaran agama Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, sejak sebelum lahir sampai dewasa, seperti memberi nama yang indah / baik, mengajarkan membaca Al-Qur'an memberi makanan yang halal dan bergizi, mendidik dengan baik dan menikahkan apabila sudah dewasa. Semua ini dalam konteks upaya mewujudkan keturunan yang berkualitas sebagai *dzurriyatan thayyibah*.³

Kedua : dimensi ekonomi, dalam Al-Qur'an kita dianjurkan memiliki keprihatinan terhadap keturunan dan jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah secara ekonomi dan *dzurriyatan dliafan*, oleh karenanya kita harus mengatur penggunaan harta kekayaan kita secara tepat.

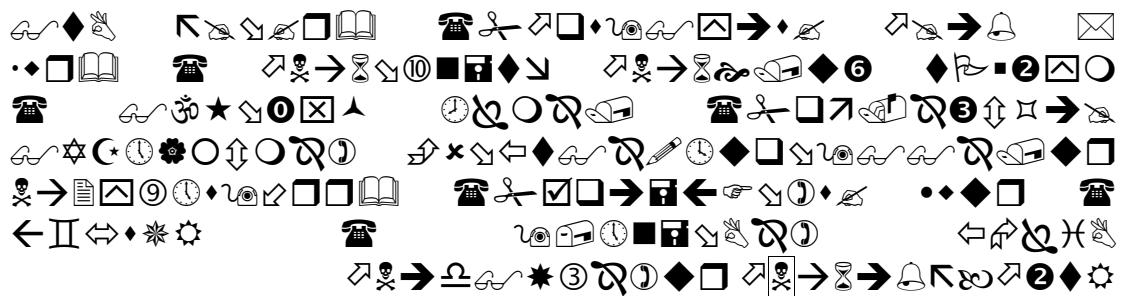
Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 9 :

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar “.

Dilain sisi Islam (Al-Qur'an) melarang menghancurkan masa depan keturunan dengan alasan ekonomi yang sulit.

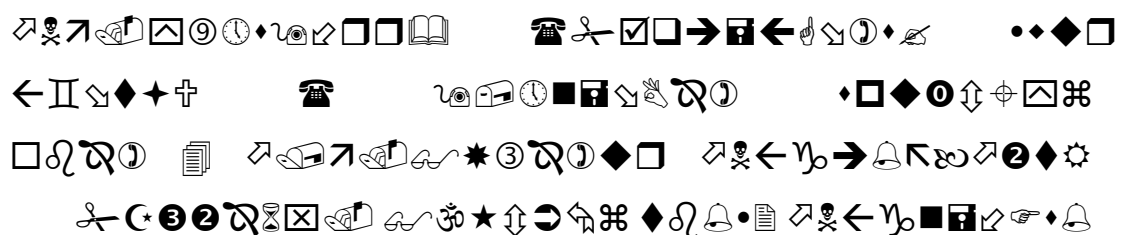
³*Ibid*, H.6



Artinya : “ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh

Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.

Dalam Ayat lain Allah SWT berfirman :



Artinya :“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ketiga : Dimensi religi (agama) keturunan dapat menjadi salah satu aset amal jariyah apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh. Dalam pandangan Islam, keturunan berkualitas (dzuriyatan thayyibah) itu mencakup tiga hal yaitu, kualitas fisik, kualitas akal dan kualitas moral (zakiyah fil qolbi, wabaston fil ilmi wal jism). Tiga macam kualitas tersebut berkaitan satu dengan lainnya.⁴

Dalam hal perkawinan melahirkan anak, untuk masyarakat Islam di Indonesia maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan, maka undang-undang perkawinan mengaturnya dalam pasal 42

⁴Ibid, H.7

sampai pasal 49. Pasal 42 sampai pasal 49 ini membahas status anak serta hubungan mereka dengan kedua orang tuanya.

Sebelum sampai pada persoalan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, masalah sahnyanya seorang anak mendapat perhatian khusus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Yang terpenting adalah pernyataan dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45-49. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban pemeliharaan anak itu tidak putus walaupun perkawinan antara suami istri itu putus.⁵

B. Pengertian Anak Yang Sah

a. Anak yang sah menurut hukum Islam

Dalam pandangan Islam seorang anak dapat dipandang sebagai anak yang sah apabila terlahir dari sebuah pernikahan yang sah, jadi apabila sah nikah kedua orang tuanya maka sah pula anak yang dilahirkannya.

Adapun Rukun dan Syarat-syarat sah nikah menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980) H. 34

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, dengan syarat kedua calon pengantin adalah bukan muhrim, baik sementara maupun selamanya.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita atau wakilnya.
3. Adanya dua orang saksi dengan syarat : berakal, baligh, merdeka, Islam, dan bisa mendengar.
4. Adanya ijab qobul dengan syarat : menggunakan lafal tertentu baik sharih (tazwij) maupun kinayah (inkaha) dilakukan dalam satu majlis, didengar oleh orang yang menyaksikannya, antara ijab dan qabul tidak berbeda maksud dan tujuan lafal sighat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.⁶

Selain itu dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil, Imam hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang telah dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah; (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam; (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui,

⁶Slamet Abidin, H. Aminuddin. Op.cit. H. 63

maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang di kandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.⁷

Menurut Anwar al Amrusy⁸ bahwa seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai seorang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukan dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif dalam hukum Islam yang memandang tidak ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula hal-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.

Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu adalah yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada satu sisi terdapat ketentuan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu sah, disisi lain anak yang dilahirkan itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili wanita tersebut. Oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.

Dalam hal ini para ahli hukum Islam sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan

⁷*Ibid*

⁸Anwar al Amrusy, *Anak Luar Nikah*, Makalah, 1960, h. 5-6

dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir diluar nikah yang patut diberi perlindungan, sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab tersebut dalam kitab-kitab fikih adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal tersembunyi pada diri seseorang.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu dalam keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dapat berdiri sendiri atau mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus penerus keturunannya.⁹

b. Anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁹ Abdul Manan, *Op.cit* h.80

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-1 H.

2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Tentang sah atau tidaknya sebuah ikatan perkawinan hal ini bisa dilihat dari syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku”.¹¹

Dan syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 harus :

1. didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
2. pada dasarnya pernikahan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri. Kecuali mendapat dispensasi oleh pengadilan agama dan syarat-syaratnya sangat berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
4. Harus mendapat izin masing-masing dari orang tua mereka kecuali dalam hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang :

¹¹Hasbullah Bakry, *Kumpulan UU Dan Peraturan Perkawinan*, (Jakarta : Djambatan, 1994), H. 3

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antar saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Perhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
 7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 jo. Peraturan menteri Agama no. 3 tentang pencatatan nikah, talak dan Ruju'.¹²

Adapun rukun nikah menurut undang-undang perkawinan dikembalikan kepada aturan dan ketetapan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 2 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.¹³

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.¹⁴

C. Anak Di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria

¹²Ibid H. 58-59

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika) th. 1995, H. 44

¹⁴Hazairin, *Tinjauan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Tintamas)Th. 1975

yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

a. Anak di luar nikah menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda, sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu (1) *zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) *zina ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja kuantitasnya berbeda, bagi penzina *muhson* dirajam sampai mati, sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhson ataupun ghairu muhson disebut anak di luar perkawinan.

Di samping hal tersebut di atas, hukum Islam juga menetapkan anak diluar nikah adalah (1) anak *mula'annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan, dan lain-lain, (2) anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu

mengakuinya. Dalam kitab *Al-Ahwal al Syakhsiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah¹⁵ ditemukan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apa pun, kecuali orang yang melakukan *syubhat* itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya. Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum di kalangan *sunny* dan *syiah*.

Hukum Islam membedakan anak *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu (1) anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah, (2) anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *syubhat*-nya atas pengakuan-nya.¹⁶

b. Anak di luar nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kriteria tentang anak di luar nikah tidak dibahas secara jelas hanya berlandaskan penafsiran secara *mafhum mukhalafah* dari pasal 42 yaitu anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah.

Selain itu disebutkan juga dalam pasal 44 ayat (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. cit.*, h. 106

¹⁶Abdul Manan, *Op. cit.*, h. 84

membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Ayat (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁷

Oleh karena tidak adanya aturan dan kriteria anak di luar nikah secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan ini hanya berdasarkan penafsiran dari pasal-pasal yang ada maka timbullah pendapat yang beragam tentang masalah ini.

Menurut H. Herusuko¹⁸ banyak faktor penyebab terjadinya anak diluar nikah, diantaranya adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain, (2) anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah seorang ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain; (3) anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan; (4) anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar nikah ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal oleh suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; (6) anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah; (7) anak yang

¹⁷Hasbullah Bakry, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*, (Jakarta : Djambatan), th. 1985, cet. 3 H. 14

¹⁸H. Herusuko, *Anak di luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani*, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996, H. 6

lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka belaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah seorang dari mereka telah beristri, tetapi mereka tetap melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak, anak tersebut merupakan anak luar nikah; (8) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

c. Anak di luar nikah menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991, dalam pasal 53 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan pernikahan ulang (*tajdidun nikah*).¹⁹ Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak luar nikah. Dalam pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar nikah ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,²⁰ tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan. Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka

¹⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, th 1991, h. 36

²⁰Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, th. 2002, h. 125

sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak di luar nikah guna menunaikan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

D. Penetapan Asal Usul Anak Dalam Undang-Undang

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari ibunya itu betul anak dari hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana disebutkan apabila terjadi salah satu kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 285-288, 294 atau 322 KUHP, maka atas kejahatannya itu dapat diajukan ke pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki yang berbuat itu sebagai bapak yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan jahatnya.

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; (2) di dalam akta perkawinan ada; (3) di dalam akta autentik. Dalam praktik hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang membuahnya

sekaligus mengakui anak luar nikahnya. Yang diakui disini adalah anak luar nikah yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. Sedangkan pengakuan cara ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta yang autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, di mana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan.²¹

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Oleh karena adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang masih membatasi kewenangan Peradilan Agama, maka penetapan asal usul anak itu masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan tentang asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi orang yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan kelahiran anak bagi yang memerlukannya.

²¹Abdul Manan Op. cit., h. 100

BAB IV
STATUS ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Akibat Pernikahan yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah
Terhadap Kehidupan Anak

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukan keturunan dan asal usulnya.¹

Dalam Undang-Undang perkawinan dikenal dua macam istilah anak, yaitu anak yang sah dan anak di luar nikah (tidak sah). Menurut H. Herusuko² banyak faktor penyebab terjadinya anak diluar nikah, diantaranya adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain, (2) anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah seorang ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih

¹Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-1 H. 78-79

²H. Herusuko, Anak di luar Perkawinan, *Makalah pada Seminar Kowani*, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996, H. 6

terkait dengan perkawinan yang lain;(3) anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan; (4)anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal oleh suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; (6)anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah; (7) anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah beristri, tetapi mereka tetap melakukan hubungan suami istri dan melahirkan, anak tersebut merupakan anak luar nikah; (8) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dari penjelasan H. Herusuko poin ke 9 dan ke 10 dapat kita pahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama apabila memiliki anak dikategorikan sebagai anak di luar nikah, dan hal

ini bisa mengancam kedudukan anak dalam mendapatkan haknya, misalnya dalam segi pembagian harta warisan, kesempatan bekerja di instansi pemerintahan dan hak perwalian bagi anak perempuan apabila sudah beranjak dewasa dan berkeinginan untuk menikah.

Masalah ini akan timbul apabila yang bersangkutan terbentur masalah administrasi pemerintahan yang membutuhkan pembuktian autentik, sebagaimana yang dialami oleh Fauzi dalam hak kewarisan dia tidak mendapatkan harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia, karena harta tersebut telah diambil oleh kakak dan saudara yang lain. Ketika dia menuntut hak waris dari saudara dan kakak-kakaknya mereka menolak, dengan alasan saat ayahnya meninggal dunia Fauzi tidak ikut menyelenggarakan jenazah ayahnya karena masih merantau di Malaysia.

Pada akhirnya Fauzi pun mengadukan masalah itu kepada Pemerintah setempat yakni Rt 04 dan Rw 03 Kelurahan Rumbai Bukit, namun masalah itu tetap tidak bisa diselesaikan karena saudaranya tetap tidak mau memberikan sebagian hak warisnya kepada Fauzi, dan menganggap Fauzi bukanlah saudaranya. Pada akhirnya pemerintah setempat meminta Fauzi menunjukkan bukti hubungan kewarisan Fauzi dengan almarhum ayahnya berupa Kartu Keluarga ataupun Akta Kelahiran, namun Fauzi tidak bisa menunjukannya karena sejak dari awal orang tua mereka tidak pernah mengurus identitas diri karena setiap mengurus identitas baik KTP, KK, maupun identitas yang lainnya selalu diminta melampirkan Akta Nikah mereka. Dan akhirnya orang tua Fauzi mengurungkan niat mereka membuat identitas diri karena tidak mempunyai Akta Nikah karena

mereka menikah di bawah tangan.³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Tentang Masalah Hak Waris

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Bermasalah	8	67%
2	Tidak bermasalah	4	33%
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data olahan

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak yang menyatakan bermasalah dengan hak warisnya, yakni sebesar 67%, sedangkan yang menyatakan tidak bermasalah hanya 33 %.

Dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa perundang-undangan mengharuskan perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena mengandung maslahat yang banyak baik terhadap status dan hak suami istri terlebih-lebih terhadap kehidupan anak keturunannya. Apalagi pada zaman sekarang manusia sudah banyak melupakan moral dan sopan santun, mereka lebih cenderung bersifat materialistis, sehingga rasa persaudaraan, persahabatan mulai mengendur. Ditambah dengan himpitan ekonomi yang morat-marit, menyebabkan banyak manusia yang mengambil jalan pintas dalam mencari harta kekayaan tidak peduli lagi halal dan haram, mengganggu dan mengambil hak orang lain adalah persoalan biasa.

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi dari Bejo yang menyesalkan dirinya tidak bisa menjadi wali nikah dari anaknya bernama

³Fauzi, *wawancara*, 11 November 2008

Rahmah. Karena status pernikahan dengan istrinya tidak jelas, dia menikah di bawah tangan dihadapan seorang Ustad disebuah proyek penebangan kayu daerah Minas, dan Ustad tersebut merangkap sebagai wali Hakim dari Minah (istrinya), dengan alasan karena pada saat itu ayah Minah berada di Jawa dan Minah tidak memberi tahu bahwa dia akan menikah.⁴ Ketika masalah ini disampaikan kepada penghulu kecamatan Rumbai Drs. Mawardi, beliau menolak Bejo sebagai wali nikah dari anaknya Rahma, karena pernikahan Bejo dengan istrinya dianggap tidak sah disebabkan kurang lengkapnya rukun nikah yaitu tidak adanya wali. Ustad tidak berhak menjadi wali hakim dengan alasan apapun karena tidak adanya *tawaliat* di dalam urutan wali hakim.⁵ Akibatnya Rahma merasa malu dan pernikahannya hampir dibatalkan, namun beruntung calon suaminya dapat menerima kenyataan dan menerima Rahma apa adanya, pada saat itu pernikahan tetap dilanjutkan dengan Drs. Mawardi sebagai wali hakim dari mempelai perempuan.⁶

Selanjutnya penulispun mendapatkan informasi melalui orang tua Girman yang bernama Miswar, mengatakan bahwa ia juga bermasalah akibat pernikahannya tidak dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah, ketika dia membuatkan akta kelahiran untuk Girman (anaknya) yang saat ini berusia 9 tahun. Ternyata pengurusan akta kelahiran untuk Girman prosesnya rumit dan berbelit-belit, karena dalam proses pembuatan akta kelahiran harus melampirkan foto kopi akta nikah sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran. Berhubung Girman lahir sebelum Miswar memiliki akta nikah, maka dibuatlah surat pernyataan bahwa Miswar telah menikah dengan Lindawati (istrinya) yang ditanda tangani oleh Lurah dan pamong, namun hasilnya anak tersebut memang bisa mempunyai akta

⁴Bejo (warga pelaku nikah bawah tangan), *wawancara*, 11 Juli 2008

⁵Mawardi (penghulu), *wawancara*, 25 Juli 2008

⁶Rahma (anak pelaku nikah bawah tangan), *Wawancara*, 12 Juli 2008

kelahiran dari kantor catatan sipil, hanya saja disebutkan dalam akta kelahiran itu anak dari seorang perempuan yang bernama Lindawati (istri Miswar) tanpa mencantumkan nama ayahnya (Miswar).⁷ Walaupun hal ini nampaknya sepele namun pada kenyataannya akan menjadi permasalahan yang besar apabila nanti anak tersebut telah tumbuh dewasa dan terbentur masalah pembuktian keturunan, seperti yang dialami oleh Fauzi.

Tabel 4.2

Tanggapan anak terhadap pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat

No	tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Kecewa	9	75%
2	Tidak Kecewa	3	25%
		12	100%

Sumber : Data olahan

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden yaitu sebesar 75% menyatakan bermasalah dengan status mereka yang terlahir sebelum perkawinannya tercatat dihadapan Pegawai pencatat Nikah, sedangkan yang menyatakan tidak bermasalah hanya sebesar 25%.

Permasalahan mereka bukan hanya secara administrasi pemerintahan saja, seperti rumitnya mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran, namun juga

⁷Miswar (warga pelaku nikah bawah tangan), *Wawancara*, 13 Juli 2008

terbebani mental sebagaimana yang dialami oleh anak Bejo dan Miswar, oleh sebab secara hukum keperdataan Indonesia anak Bejo dan Miswar yang lahir sebelum mereka mempunyai akta nikah, dianggap bukan anak yang sah, walaupun secara biologis memang anaknya.

Hal seperti ini tentunya harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang masih beranggapan bahwa asalkan menurut agama sah, maka tidak peduli pernikahannya tercatat ataupun tidak, karena yang menjadi korban bukan hanya dirinya tetapi anaknya pun akan menjadi korban. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang perkawinan dan membentuk keluarga sakinah kepada masyarakat awam. Karena Islam bukanlah Agama yang statis yang hanya berkisar disitu-situ saja, melainkan agama dinamis selalu bergerak sesuai dengan kemaslahatan umat.

Jika dulu dimasa Rasulullah dan para sahabatnya, mencatat pernikahan belum dianggap penting sangatlah wajar, karena pada saat itu belum terjadi masalah-masalah pelik menyangkut soal keabsahan pernikahan yang membutuhkan bukti-bukti secara tertulis. Tetapi pada zaman sekarang pencatatan perkawinan sangatlah penting, selain untuk melindungi hak-hak perempuan juga berfungsi untuk melindungi hak anak-anak mereka.

Dari kenyataan dan kondisi tersebut di atas jelas bahwa baik orang tua maupun anak-anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan bermasalah dengan status mereka. Mereka merasa resah dengan hak-hak mereka sebagai orang tua ataupun sebagai anak yang biasanya saling mewarisi, dapat menjadi wali nikah dan sebagai penerus keturunan yang sempurna.

Tabel 4.3

Tanggapan anak terhadap pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat

No	tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Resah	8	67%
2	Tidak Resah	3	33%
		12	100%

Sumber : Data olahan

Tingkat keresahan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan mencapai 67%. Sebagaimana yang diungkapkan Intan Mariana anak dari Joni Tobing dan Siti Naimah, dia mengaku bahwa kepala DISDADUK PENCAPIL tidak bersedia menanda tangani Akta Kelahirannya karena tidak melampirkan foto copy buku nikah orang tua, karena Joni Tobing dan Siti Naimah hanya menikah Syar'i di kecamatan Kubu.tidak Tingkat keresahan ini memang sangat mendasar karena telah adanya bukti-bukti dari anak-anak lain di kecamatan Rumbai, yang mempunyai status sama bermasalah dengan hak-hak keperdataan mereka. Apalagi kebanyakan dari mereka kurang mendapat pendidikan yang memadai baik di sekolah umum maupun sekolah-sekolah pendidikan agama. Sedangkan disisi lain persaingan hidup seperti persaingan mengejar materi tidak dapat dielakan lagi sebagai akibat heterogenitas masyarakat dan pengaruh gaya hidup masyarakat kota, sehingga pelanggaran terhadap norma-norma (norma hukum, norma agama, norma adat istiadat) kemungkinan besar bisa terjadi. Sedangkan 33% yang mengatakan tidak merasa resah dengan hak-haknya yaitu mereka yang hidup dalam lingkungan keluarga yang cukup berpendidikan dan taat beragama antar keluarga saling menghargai dan tidak ada saling mengancam.

B. Sikap Orang Tua dan Anak Terhadap Prosedur dan Hasil Kutipan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah salah satu bentuk dokumen Akta Catatan Sipil yang berisi catatan peristiwa penting diri pribadi seseorang.

Akta Kelahiran juga merupakan bukti otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum diri pribadi pemiliknya.

Akta kelahiran terdiri dari dua jenis :

1. Akta Kelahiran Tidak Terlambat, yaitu akta kelahiran yang pendaftarannya belum melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya dan tidak dikenakan biaya (gratis)
2. Akta Kelahiran Terlambat, yaitu Akta Kelahiran yang pendaftarannya sudah melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya dan dikenakan biaya sesuai Perda Kota Pekanbaru N0. 8 Tahun 2000.⁸

Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat banyak bagi diri pemegangnya, dan merupakan bukti penjelas bagi asal usul seseorang. Diantara manfaat akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Memasuki Sekolah TK sampai Perguruan Tinggi
2. Mengurus Bea Siswa
3. Membuat KTP, SIM, PASPOR
4. Melamar Pekerjaan
5. Melangsungkan Perkawinan
6. Mengurus Tunjangan Keluarga
7. Mengurus Asuransi
8. Mengurus Pensiunan

⁸Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, *Petunjuk Praktis Pengurusan akta Kelahiran*, 2007

9. Mengurus akta kematian

10. Mengurus Warisan Dan Surat Keterangan Ahli Waris

11. Tertib administrasi kepegawaian

12. Tertib administrasi kependudukan dan pemerintahan.

Adapun Syarat-syarat pengurusan akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Asli surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah Sakit.
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua.
3. Foto copy kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua (apabila tidak ada) maka pencatatan akta kelahiran anak menjadi anak seorang Ibu.
4. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi
5. Asli surat keterangan kelahiran dari Lurah
6. Foto copy KTP, Ijazah, yang bersangkutan bagi yang telah memiliki
7. Melampirkan Foto copy Akta Kelahiran orang tua (bagi warga keturunan)
8. Khusus pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya (keberadaan orang tuanya), pelapor / pemohon mengisi formulir surat kelahiran dengan menyerahkan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Dari keterangan di atas jelas bahwa akta kelahiran sangatlah besar manfaat dan melindungi hak-hak keperdataan pemiliknya. Namun tidak bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya memiliki akta nikah, karena anak dari orang tua yang tidak mempunyai akta nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan orang tua dari anak tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Gangsar yang mengurus akta kelahiran untuk persyaratan masuk SD anak pertamanya Rino. Dirinya merasa kecewa ketika melihat dikutipan akta kelahiran anaknya tidak tertulis nama Gangsar

hanya tertulis nama Misnawati saja (istrinya). Padahal hal tersebut sangatlah berarti bagi Gangsar karena dia ayah kandung dari Rino dan dirinyalah yang menafkahi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi anak dan istrinya.⁹

Tabel 4.4

Tanggapan Orang Tua Terhadap Hasil Kutipan Akta Kelahiran Anaknya

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Kecewa	10	83 %
2	Tidak Kecewa	2	17 %
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Data olahan

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian dari responden orang tua yang memiliki anak sebelum mereka mempunyai Akta Nikah yaitu sebesar 83 % menyatakan merasa kecewa dengan hasil kutipan Akta Kelahiran yang hanya memuat nama istrinya tanpa memuat nama mereka (suaminya). Sedangkan yang menyatakan tidak kecewa hanya sebagian kecil saja yaitu sebesar 13 %.

Begitu juga halnya yang dirasakan oleh anak-anak mereka, sebagaimana yang diungkapkan Darwis yang sekarang sudah duduk di kelas 2 SMA, merasa kecewa dan malu mempunyai Akta Kelahiran yang tidak memuat nama ayahnya, seakan-akan dirinya anak *zina* padahal menurut keluarga dan tetangganya, dirinya anak sah dari Jarwo (ayahnya), hanya saja orang tuanya menikah di bawah tangan dan ketika dirinya lahir orang tuanya belum mengurus Akta Nikah.¹⁰ Sebagaimana yang terlihat pada data berikut ini.

Tabel 4.5

Tanggapan Anak Terhadap Hasil Kutipan Akta Kelahiran Mereka

⁹Gangsar (warga pelaku nikah bawah tangan), *wawancara*, 14 Agustus 2008

¹⁰Darwis (anak pelaku nikah bawah tangan), *Wawancara*, 19 Agustus 2008

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Kecewa	9	75 %
2	Tidak Kecewa	3	25 %
	Jumlah	12	100 %

Sumber : Data olahan

Apabila diperhatikan data pada tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebanyak 75 % dari responden menyatakan bahwa mereka merasa kecewa dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tidak memuat nama ayah mereka, hanya sebagian kecil saja yang merasa tidak kecewa yaitu sebesar 25 %.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marzuki, kekecewaannya adalah karena dia adalah anak yang sah, tetapi kedudukannya disamakan dengan anak-anak diluar nikah didalam hal sama-sama tidak tercantum nama ayah mereka dalam kutipan akta kelahiran. Hal ini sangat mengkhawatirkan Marzuki karena bukti otentik hubungannya dengan Ridwan ayah kandungnya hanya dapat di tunjukan dengan kutipan akta kelahiran.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, sangat jelas bahwa undang-undang perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak warga negara yang berkaitan dengan masalah hukum keperdataan. Namun sangat disayangkan masih adanya anggapan dari sebagian tokoh-tokoh agama yang menganggap bahwa nikah bawah tangan adalah sah dengan bersumber kepada buku-buku fikih klasik tanpa menengok, kapan buku fiqh itu di buat, dalam situasi seperti apa. Sehingga dapat mencegah terjadinya fatwa yang dapat menyesatkan dan menyusahkan ummat.

¹¹Marzuki(anak pelaku nikah bawah tangan), *wawancara*, 4 september 2008

Kalau kita lihat salah satu faktor masih beraninya masyarakat menikah di bawah tangan adalah, karena masih adanya ulama atau tokoh agama yang menganggap tertulis ataupun tidak dalam prosesi akad nikah asal telah terpenuhi syarat dan rukun nikah maka nikahnya adalah sah, pendapat seperti ini tentunya secara tidak langsung telah melegalkan nikah di bawah tangan. Maka dari itu seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap masalah pencatatan pernikahan ini, andaikata pencatatan perkawinan itu wajib, maka harus dibuat sanksi bagi yang melanggarnya. Dan untuk meminimalkan kasus nikah liar ini seharusnya pemerintah membuat program penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam setiap pernikahan sampai ke desa-desa.

C. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Status Anak yang Lahir sebelum Pencatatan Perkawinan

Dari pembahasan terhadap permasalahan di atas, maka pada bagian ini penulis memberikan analisis berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Tentang Akibat Pernikahan Yang Tidak di Catat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Kehidupan Anak

Pada bagian ini penulis akan membahas tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada kehidupan anak, yang terjadi di Kecamatan Rumbai sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya yaitu :

a. Ayah tidak dapat menjadi wali nikah pada pernikahan anak perempuannya

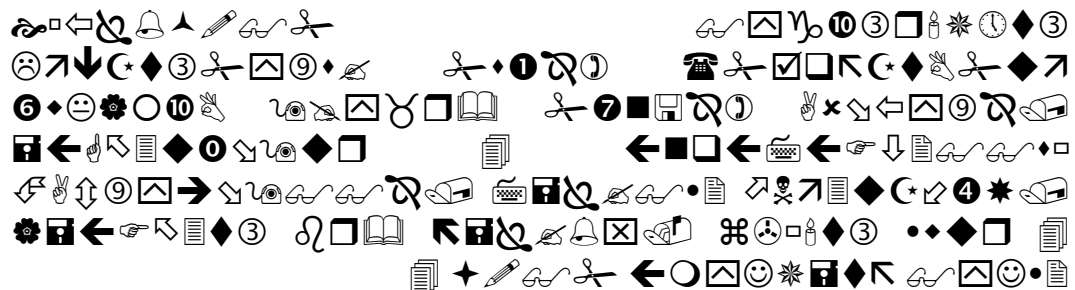
Kasus ini adalah kasus yang dialami Bejo yang tidak dapat menjadi wali nikah pada pernikahan anak perempuannya yang bernama Rahma. Pada saat itu

penghulu mendapat keterangan dari ketua RW bahwa Bejo tidak mempunyai Akta Nikah. Selanjutnya penghulu bertanya kepada Bejo tentang pernikahannya, dan akhirnya Bejo menjelaskan bahwa dia dinikahkan oleh seorang ustad di Minas yang sekaligus sebagai wali hakim dari istrinya, karena tidak mau repot mendatangkan ayahnya yang jauh di pulau Jawa. Akhirnya penghulu pun mengambil kesimpulan untuk tidak memberi izin Bejo menjadi wali nikah anak perempuannya karena ada Fasidnya syarat yakni Ustad bertindak sebagai wali Hakim, padahal Ustad tidak dapat menjadi wali hakim dengan alasan apapun karena tidak adanya *tawaliat* dari urutan orang-orang yang berhak menjadi wali hakim dan juga karena mereka menikah dibawah tangan.

Untuk mengetahui status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan termasuk anak yang sah atautkah tidak, maka kita harus membahas sah atau tidaknya pernikahan dibawah tangan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 pasal 1 Ayat (1) disebutkan Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 pasal (1) disebutkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Perkembangan selanjutnya ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan aturan pencatatan perkawinan bukan bersifat mengada-ngada dan tanpa dasar melainkan berdasarkan analogi (qias) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”¹²

Di dalam masalah ini Mahkamah Agung RI, sependapat bahwa Pencatatan Perkawinan itu adalah suatu hal yang wajib dan nikah di bawah tangan adalah tidak sah, dalam sebuah putusan kasasi Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surya Cipta Aksara : Surabaya, 1993), h. 70

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah yang fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal.

Bertitik tolak dari pembahasan ini maka anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah termasuk anak tidak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 250 BW “ anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu diperkuat juga dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

b. Tidak dapat menuntut hak waris dari orang tua laki-laki melalui pengadilan

Kasus ini adalah kasus yang dialami oleh Fauzi, dia tidak mendapatkan bagian harta warisan peninggalan ayahnya, karena habis dijual oleh saudara-saudara kandungnya. Namun dia tidak bisa menuntutnya ke Pengadilan karena tak satupun bukti otentik yang menunjukkan bahwa Fauzi adalah ahli waris dari ayahnya, karena sewaktu hidupnya orang tua Fauzi tidak pernah mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran bagi anak-anaknya. Fauzi mengungkapkan keenganan orang tuanya mengurus Tertib administrasi Kependudukan adalah karena setiap berkeinginan mengurusnya selalu diminta melampirkan Akta Nikah padahal orang tuanya menikah dibawah tangan.

Untuk melihat akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan dapat ditafsirkan secara *a contratio* dari akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut undang-undang sebagai tersebut di bawah ini :

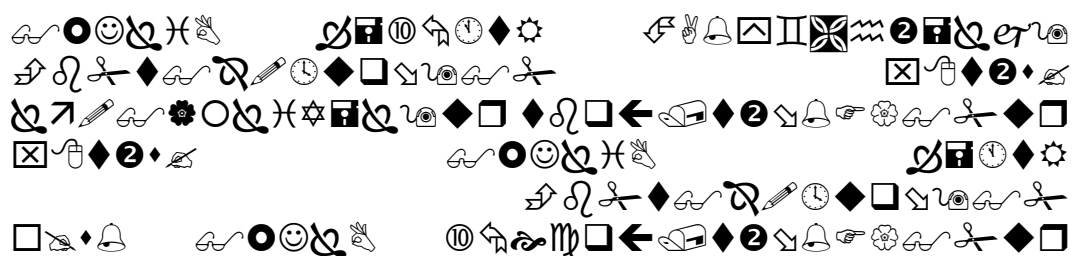
- a) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.

- b) Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik isteri.
- c) Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.
- d) Suami menjadi Kepala Keluarga dan istri menjadi Ibu Rumah Tangga.
- e) Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- f) Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya.
- g) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i) Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j) Antara suami-isteri berhak saling waris mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.¹³

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti yang tersebut diatas, karena perkawinan dibawah tangan sukar untuk dibuktikan.

Begitu pula halnya dalam prihal waris, menurut hukum fiqh Fauzi berhak mendapatkan warisan karena termasuk anak dari pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara lengkap.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 7, yang berbunyi :



¹³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), H. 23



Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.¹⁴

Namun karena orang tua mereka telah tiada dan tidak ada satupun bukti otentik bahwa Fauzi adalah ahli warisnya, maka ketika menyentuh ranah hukum positif semuanya akan kandas, karena di dalam hukum positif selalu menuntut pembuktian-pembuktian.

2. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Tentang Sikap Orang Tua dan Anak Terhadap Prosedur dan hasil Kutipan Akta Kelahiran

Dalam persyaratan pengurusan akta kelahiran anak, haruslah melampirkan foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua (apabila tidak ada) maka pencatatan Akta Kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibunya saja, tanpa mencantumkan nama ayah.

Hal inilah yang menjadi kekecewaan orang tua dan anak yang tidak memiliki kutipan akta nikah. Mereka merasa bahwa hal ini tidak adil, karena anak mereka disamakan kedudukannya dengan anak diluar pernikahan dalam pengertian sama-sama tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Sedangkan akta kelahiran ini sangatlah berguna bagi masa depan anak, sebagai bukti identitas diri yang autentik menunjukkan asal usul dan hubungan

¹⁴*Ibid*, h.116

keturunan antara anak dan kedua orang tuanya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 55 Ayat (1) asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Masalah bagi mereka adalah mereka memiliki akta kelahiran tetapi nama ayah mereka tidak tercantum dalam kutipan akta kelahiran. Seandainya orang tua mereka hidup untuk selamanya tentu tidak akan terjadi masalah, namun ketika orang tua mereka telah tiada maka siapa lagi yang akan memberikan kesaksian dihadapan pengadilan tentang asal usul mereka ketika anak tersebut membutuhkan kesaksiannya.

Bertitik tolak dari semua permasalahan yang dialami oleh anak yang lahir sebelum orang tuanya mempunyai kutipan akta nikah, maka Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pandangan Undang-undang Perkawinan terhadap anak tersebut adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan beberapa alasan :

1. Perintah terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternative secara terpisah dan berdiri sendiri.

Sedangkan Hukum asal dari perintah itu adalah wajib, sesuai dengan Kaidah

“Hukum asal dari perintah adalah Wajib”

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang tidak sahnya perkawinan di bawah tangan, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 dan 6 Tahun 2008 yang menyamakan kutipan Akta Kelahiran Anak dari pernikahan dibawah tangan dengan anak diluar pernikahan.
3. Kesulitan yang dihadapi oleh anak, sebagai akibat mereka lahir sebelum orang tuanya memiliki akta nikah. Sedangkan Agama menghendaki kemudahan dan menghindari kesulitan.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh Ayat185 :



Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Hal ini sesuai pula dengan Kaidah Fiqh:

يزال

“ Kesulitan harus dihilangkan”

Dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat menyulitkan kehidupan kita harus kita hindari. Seperti pernikahan di bawah tangan, banyak menimbulkan kesulitan daripada maslahat. Maka pernikahan seperti ini harus dihindari.

Apabila pernikahan orang tuanya tidak sah maka anak yang dilahirkannyapun dianggap tidak sah.

“Apabila pokok gugur, maka cabangpun ikut gugur”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun akibat pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah terhadap kehidupan anak yang berada di Kecamatan Rumbai, sebagian besar adalah bermasalah dengan status mereka, yaitu ada diantara ayah mereka yang tidak diperkenankan menjadi wali nikah, tidak mendapat bagian harta warisan dari ayahnya dan tidak dapat menuntutnya kepengadilan, serta penulisan kutipan akta kelahiran mereka hanya tertulis nama ibu, tanpa menyertakan nama ayahnya.
2. Sikap orang tua dan anak terhadap prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran di Kecamatan Rumbai, secara umum merasa kecewa, karena hal itu sama halnya menyamakan mereka dengan anak-anak yang lahir diluar perkawinan dalam pengertian sama-sama tidak tercantum nama ayah mereka dalam kutipan akta kelahiran mereka.
3. Adapun tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap hal tersebut di atas, jelas bahwa status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan adalah tidak sah, karena dalam undang-undang perkawinan pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan, apabila keharusan ditinggalkan maka nikahnya fasid bahkan sampai tidak sah, apabila nikahnya tidak sah maka anaknyaapun tidak sah. Selain itu Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan bahwa nikah dibawah tangan adalah tidak sah.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, para Sarjana Islam dan tokoh-tokoh Agama hendaknya satu kata dalam menentukan kedudukan pencatatan dalam perkawinan apakah suatu kewajiban atau sekedar pelengkap saja, andaikata merupakan suatu kewajiban pemerintah hendaknya bersikap tegas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang kewajiban pencatatan perkawinan dan sanksi-sanksinya sebagai langkah untuk mempertegas keharusan tersebut. Jangan sampai terjadi dualisme hukum Islam, karena akan membingungkan masyarakat.
2. Bagi para Sarjana Islam dan tokoh-tokoh Agama hendaklah mendukung aturan yang dibuat oleh pemerintah jika di dalam aturan tersebut ada *maslahat* yang besar, jangan sampai memfatwakan sesuatu karena sentimen mazhab tertentu tanpa memperhatikan unsur kemaslahatan bagi ummat.
3. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait, hendaklah mensosialisasikan tentang keharusan pencatatan perkawinan dan kesulitan akibat dari pernikahan di bawah tangan kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat apalagi masyarakat pinggiran masih buta terhadap hukum.
4. Bagi masyarakat yang sudah mengetahui keharusan pencatatan perkawinan hendaknya patuh terhadap hukum, karena dengan pencatatan perkawinan dapat melindungi hak dan kewajiban suami istri juga hak dan kewajiban anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Janganlah sampai mencari kemudahan-kemudahan tetapi pada akhirnya malah mengundang masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-mazahib Al-arbaah*, Al maktabah Tijariyahal kubra, Beirut, 1969.
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah jilid 3*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007.
- Admodjo Sastro, dan Aulawi Wahbahri, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Al-jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh wanita*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1986.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, C.V. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Semarang, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kudzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mustafa Muhammad Imaroh, *Jawahir Albukhori*, CV Toha Putra, Semarang, 1940
- Ramulyo Mohd idris, *Hukum perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Slamet Abidin-Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Liberti, yogyakarta, 1982.

Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.

W.J.S Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994.

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam*, Kencana, Jakarta, 2006.

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Perkelurahan Tahun 2009.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkelurahan Dalam Kecamatan Rumbai Maret 2009.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Rumbai Tahun 2008.....	23
Tabel 2.4	Data Sekolah Negeri Dan Swasta Di Kecamatan Rumbai.....	25
Tabel 2.5	Data Sekolah Agama Negeri Dan Swasta Di Kecamatan Rumbai.....	26
Tabel 2.6	Data Sarana Ibadah Di Kecamatan Rumbai.....	28
Tabel 4.1	Tanggapan Responden Tentang Masalah Hak Waris.....	51
Tabel 4.2	Tanggapan Anak Terhadap Pernikahan Orang TuanyaYang Tidak Tercatat.....	53
Tabel 4.3	Tanggapan Orang Tua Terhadap Hasil Kutipan Akta Kelahiran Anaknya.....	58
Tabel 4.3	Tanggapan Anak Terhadap Hasil Kutipan Akta Kelahiran Mereka.....	59

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANAK

1. Siapa nama adik/abang/kakak?
2. Berapa usiaAdik/abang/kakak?
3. Apakah betul adik/abang/ kakak lahir sebelum orang tua adik/abang/kakak mempunyai buku nikah?
4. adakah kendala yang dirasakan sebagai akibat terlahir sebelum orang tua adik/abang/kakak mempunyai buu nikah?
5. kendalanya seperti apa kira-kira ?
6. adakah solusinya ? seperti apa ?
7. masalah prosedur dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang hanya tertulis nama ibu saja apa sikap adik/abang/kakak?
8. kenapa seperti itu?
9. apa harapan adik/abang/kakak kedepan?
10. terima kasih

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ORANG TUA

1. siapa nama ibu/ bapak ?
2. katanya pernah ikut nikah massal ya?
3. jadi sebelum mengulang nikah ibu/bapak nikah di mana?
4. jadi tidak nikah di KUA ya?
5. siapa yang menikahkan ibu/ bapak pada waktu itu?
6. tentang rukun nikahnya lengkap atau tidak? Yaitu pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kobul?
7. sekarang sudah punya anak kan?
8. adakah kendala yang dirasakan anak bapak/ibu akibat anak bapak/ibu terlahir sebelum ibu/bapak mempunyai akta nikah?
9. kendala seperti apa ?
10. tentang prosedur dan hasil kutipan akta kelahiran yang hanya tertulis nama ibu tanpa menyertakan nama ayah, bagaimana sikap bapak/ibu?
11. kenapa begitu?
12. terima kasih atas informasinya.